

Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II

Adiasri Putri Purbantina

Alumnus Program Kajian Jepang Universitas Indonesia

e-mail: adiasri.p@gmail.com

ABSTRACT

Japan's foreign policy in Southeast Asia in the postwar era was based on Yoshida Doctrine. After her lost in World War II, Prime Minister Yoshida Shigeru declared that economic development will be Japan's priority. At that time, Japan's interest on Southeast Asia especially was related to raw materials as one of the tools to build her economy. However, the use of this economic diplomacy created several anti-Japanese movements in some Southeast Asia Countries. In 1977, Prime Minister Fukuda Takeo came to the 10th ASEAN Anniversary and declared that Japan has no intention to be the next hegemonic power in the region. Thus he formed a new framework for Japan's foreign policy which based on "heart to heart understanding" and added cultural approach into it.

Keywords: *economic diplomacy, cultural approach.*

Pasca-Perang Dunia II, Jepang menggunakan bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida yang secara resmi dijalankan sejak tahun 1957. Pada saat itu proses kembali masuknya Jepang ke Asia Tenggara menitikberatkan pada aspek perekonomian yang meliputi pembayaran pampasan perang dan juga kebutuhan Jepang akan raw materials dari negara-negara Asia Tenggara. Ekspansi ekonomi dan perdagangannya di awal tahun 1970-an mengembalikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi besar dan ini membuat gejolak di dalam negara-negara di Asia Tenggara. Ketika PM Tanaka Kakue datang ke Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1974, ia menghadapi beberapa demonstrasi kemarahan dan tuduhan akan arogansi bisnis Jepang. Pada tahun 1977, PM Fukuda Takeo berusaha sekali lagi untuk memperluas hubungan politik dengan negara-negara Asia Tenggara saat perayaan ulang tahun ASEAN ke-10. Ia lalu mengusung sebuah bentuk kebijakan luar negeri baru dengan mengedepankan unsure heart to heart understanding dengan negara-negara Asia Tenggara, dimana salah satu aspek yang dimunculkan adalah pendekatan budaya.

Kata-Kata Kunci: *diplomasi ekonomi, pendekatan kultural.*

Sejak kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang menjalankan kebijakan luar negeri dalam bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida. Kebijakan tersebut secara resmi dijalankan sejak 1957 dan kemudian menjadi dasar kebijakan Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Sueo 1992, 2). Diplomasi ekonomi adalah bentuk *peaceful expansion* dari ekonomi pasar luar negeri Jepang untuk membangun ekonomi nasionalnya, yang kemudian menjadi *modus vivendi* dari kebijakan luar negeri negara tersebut. Tetapi sejak 1977, Yoshida

Doctrine digantikan oleh *Fukuda Doctrine* yang diproklamasikan oleh PM Takeo Fukuda dalam pidatonya di Manila. Doktrin ini dirancang untuk menjadi dasar bahwa kebijakan Jepang lebih diarahkan ke Asia Tenggara dan mendorong agar Jepang memainkan peranan politik yang positif di wilayah ini (Sueo 1992, 3-4). Sejak inilah, kemudian hubungan Jepang-Asia Tenggara dianggap memasuki fase baru.

Tulisan ini membahas awal pergeseran yang terjadi dari Doktrin Yoshida (*Yoshida Doctrine*)-yang berdasarkan diplomasi ekonomi dan juga didasarkan pada keterikatan Jepang dengan Amerika Serikat- menuju Doktrin Fukuda (*Fukuda Doctrine*). Dalam doktrin Fukuda, Jepang mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, dimana selain ekonomi, juga terdapat orientasi politik dan kultural sebagai pilarnya. Bagaimana pergeseran politik luar negeri Jepang tersebut dan bagaimana implementasinya terutama bagi Indonesia ?

Menurut Rosenau (1976) dalam bukunya yang berjudul *World Politics: An Introduction*, terdapat tiga bagian integral dari kebijakan luar negeri yang sering disebut dengan tiga konsep kebijakan luar negeri, yaitu: (1) kebijakan luar negeri sebagai *cluster of orientation*; (2) kebijakan luar negeri sebagai *a set of commitments*; dan (3) kebijakan luar negeri sebagai *a form of behaviour*. Sebagai *cluster of orientation*, kebijakan luar negeri merujuk kepada segala tingkah laku, persepsi, dan nilai, yang semuanya berasal dari pengalaman historis suatu negara dan situasi strategis yang menandai tempatnya dalam *world politics*. Singkatnya, hal ini menjadi prinsip dasar tingkah laku negara di level internasional. Lalu, *a set of commitments* merujuk kepada pengungkapan strategi, keputusan nyata, dan kebijakan yang dapat diobservasi, yang diambil ketika negara berhubungan dengan lingkungan eksternalnya. Sedangkan *a form of behaviour* merujuk kepada fase empiris yang melibatkan langkah nyata ataupun kegiatan-kegiatan yang dijalankan negara terkait dengan kebijakan tersebut.

Selain itu, literatur-literatur terkait dengan rekonstruksi kebijakan luar negeri dimulai pada tahun 1980-an oleh James N. Rosenau. Argumen dasar Rosenau adalah:

Our understanding of politics can better be deepened and broadened by treating political phenomena as forms of human adaptation. . . . the political organism is always experiencing both continuities and change, and thus is always in motion, slipping behind, moving ahead, holding fast, or otherwise adjusting and changing in response to internal developments and external circumstances. Therefore, . . . to analyze how the adjustments are made, the changes sustained, and the continuities preserved is to engage in the study of political adaptation.

(Cooney, 2007)

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri pada intinya merupakan sebuah mekanisme bagi suatu *nation* untuk mengadopsi atau berhadapan dengan perubahan yang terjadi di dunia sekitarnya.

Singkatnya, dalam melihat *Fukuda Doctrine* sebagai kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, maka dapat dilihat dari berbagai sisi. Dimulai dari latar belakang sejarah kembali masuknya Jepang ke Asia Tenggara, isi *Fukuda Doctrine*, serta kejadian-kejadian apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya doktrin tersebut, termasuk peristiwa-peristiwa di level internasional, kondisi politik (di level *decision maker*), dan juga kondisi ekonomi negara Jepang saat itu. Jangkauan waktu yang digunakan dalam tulisan ini adalah sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II hingga berakhirnya masa kepemimpinan Fukuda pada tahun 1978.

War-Compensation Diplomacy dan Yoshida Doctrine sebagai Latar Belakang Kembalinya Jepang ke Asia Tenggara

Sejak kalah di Perang Dunia II dan ditetapkannya *Postdam Declaration* pada bulan Agustus 1945, Jepang berada di bawah kendali kekuatan sekutu (*allied powers*) atau SCAP (*Supreme Commander for the Allied Power*), yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur dan Jendral Matthew Ridgway (Sueo 1992, 25). Seperti negara lain yang kalah perang, Jepang saat itu menghadapi sebuah kewajiban reparasi perang (*reparations obligation*), seperti yang tertuang dalam *Postdam Declaration*: “Jepang diperbolehkan untuk mempertahankan industri-industri yang dapat menopang perekonomiannya dan mengizinkan adanya *exaction of reparations*, tetapi tidak diperbolehkan untuk memperkuat kekuatan untuk perang”. Jepang saat itu berada di bawah tangan Amerika Serikat dan tujuannya adalah demokratisasi dan demiliterisasi Jepang. Reparasi perang ditetapkan untuk memberikan kompensasi bagi penderitaan dan kehancuran yang dibawa oleh militer Jepang dalam perang (Sueo 1992).

Di era pendudukan sekutu tersebut, dilaksanakan pemilu Diet yang pertama pada bulan April 1946 (James 2001). Pada bulan Mei, Shigeru Yoshida, yang merupakan ketua partai politik konservatif, *Liberal Party*, diangkat menjadi perdana menteri. PM Yoshida menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada periode 1946-1947 dan periode 1948-1954. Jepang berada di bawah pendudukan sekutu hingga tahun 1952. Pada bulan September 1951, ditandatangani sebuah *Japanese Peace Treaty* dalam *San Francisco Conference* yang mulai aktif pada April 1952 (James 2001). Kebijakan luar negeri Jepang sejak era *postwar* dikenal menggunakan diplomasi yang *low profile*, dengan mengedepankan pengembangan ekonomi. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan “*Yoshida Doctrine*” yang dikeluarkan oleh PM Yoshida, sebagai tokoh pengarah sebagian besar prioritas kebijakan Jepang pada era ini (Mark 2001).

Tujuan utama Yoshida pada saat itu adalah memfokuskan pada perbaikan ekonomi yang hancur setelah Perang Dunia II dan menyerahkan urusan pertahanan militer kepada AS, dimana sejak saat itu Jepang berada di bawah perlindungan payung militer AS. Berikut ini adalah “Prinsip Dasar Reparasi” yang dikeluarkan di Tokyo pada 13 Desember 1951: (1) *Service should be furnished within the financial and economic abilities of Japan;* (2) *There should be supply latitude in any type of service desired;* (3) *The furnishing of any service should not entail any foreign exchange burden upon Japan;* (4) *No service in production which eventually hamper Japan’s normal export can be furnished.*

Dengan ditetapkannya prinsip-prinsip dasar tersebut, pemerintah Jepang kemudian harus berurusan dengan para penerima reparasi. Indonesia mengirimkan misi reparasi pertamanya pada bulan Desember 1951 dan meminta pembayaran sebesar 17,5 miliar dollar AS termasuk *services* dan *cash payments*. Sedangkan negara lain, Filipina, meminta pembayaran sebesar 8 miliar dollar AS (Sueo 1992, 39). Pada waktu itu, Yoshida mengambil kebijakan diplomasi ekonomi dengan ide untuk mengaitkan antara pembayaran reparasi dengan promosi perdagangan Jepang (Sueo 1992, 40).

Dalam periode ini, politik luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia tenggara didasari oleh adanya keterkaitan antara kebijakan reparasi perang, kepentingan ekonomi Jepang, dan strategi perang dingin AS. Pada tahun 1950-an, dikarenakan adanya kesulitan untuk bergantung kepada pasar Cina, para pembuat kebijakan di Jepang mulai melirik Asia Tenggara sebagai penyedia *raw material* sekaligus sebagai pangsa pasar yang besar bagi produk-produk Jepang. Pada saat yang bersamaan, kebijakan AS terhadap Asia Tenggara juga memasuki tahap baru yaitu terkait dengan

kepentingan melindungi Vietnam Selatan dari ekspansi komunis dalam perang Vietnam (Sueo 1992, 3). Pada masa tersebut, Jepang menjadi tempat basis militer AS dalam perang Vietnam.

Tetapi seiring dengan berakhirnya perang Vietnam pada 1975, diselenggarakannya ASEAN Summit Conference 1976, dan dengan keluarnya AS dari wilayah Asia Tenggara, maka pada saat itu Jepang diharapkan mengambil langkah lebih untuk mendukung organisasi regional di kawasan. Sejak 1977, Jepang muncul sebagai aktor politik yang dianggap berpengaruh di wilayah Asia Pasifik. PM Takeo Fukuda dalam pidatonya di Manila mengeluarkan apa yang disebut *Fukuda Doctrine* yang dirancang untuk menjadi dasar bahwa kebijakan Jepang lebih diarahkan ke Asia Tenggara dan mendorong agar Jepang memainkan peranan politik yang positif di wilayah ini (Sueo 1992, 4).

Fukuda Doctrine: Kemunculan dan Perkembangannya

Selama dua dekade pertama era *postwar*, Jepang mendasari hubungan politiknya pada Asia Tenggara dengan menjaga kerendahan hati (Michael 2003). Pada tahun 1974, PM Kakue Tanaka melakukan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara untuk melakukan ‘tes’ keadaan sekaligus memperluas hubungan yang tidak hanya berdasar pertukaran ekonomi semata (Michael 2003).

Kemunculan Jepang pada tahun 1970-an sebagai pemain utama dalam ekonomi global memunculkan kekhawatiran di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai peran apakah yang akan dimainkan oleh Jepang. Beberapa ketakutan muncul terkait kemunculan Jepang sebagai kekuatan ekonomi raksasa. Ketika PM Jepang Kakue Tanaka mengunjungi Asia Tenggara pada tahun 1974, terdapat gerakan protes anti-Jepang di Indonesia (peristiwa Malari) dan Thailand. Protes tersebut diarahkan pada penolakan terhadap MNC (perusahaan multinasional) dari Jepang yang dikhawatirkan akan mengambil alih pasar lokal. Hal ini selain terkait dengan pengalaman buruk di masa perang, juga menunjukkan adanya indikasi bahwa Jepang dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang eksploitatif. Jepang kemudian berusaha menghapuskan anggapan negatif semacam ini melalui aliran besar program-program bantuan (Michael 2003, 183). Hal ini selain terkait dengan kekacauan-kekacauan anti-Jepang, juga terkait dengan adanya ASEAN Summit di Bali pada bulan Februari 1976, dimana Jepang tidak diundang (James 2001, 98).

Pada tahun 1977, PM Fukuda Takeo berusaha sekali lagi untuk memperluas hubungan politik dengan negara-negara Asia Tenggara saat perayaan ulang tahun ASEAN ke-10 (Michael 2003). Fukuda memfokuskan kepada ASEAN dan pada tema integrasi regional di Asia Tenggara, dimana ia menetapkan sebuah *Japan-ASEAN Forum For Economic Dialogue* serta menawarkan paket bantuan sebesar 1,5 miliar dollar AS. Fukuda menekankan bahwa Jepang kini sudah tidak memiliki aspirasi untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan (Michael 2003). Lalu kemudian muncul suatu inisiatif besar kebijakan luar negeri Jepang oleh PM Takeo Fukuda, dimana di dalamnya terdapat serangkaian prinsip-prinsip dasar hubungan Jepang-Asia Tenggara yang dikenal dengan *Fukuda Doctrine*. Doktrin ini memiliki tiga aspek (Sueo 1992) : (1) Jepang akan menjauhi peran sebagai kekuatan militer regional; (2) Jepang akan memperkuat ikatan dengan negara-negara Asia Tenggara (*heart to heart understanding*); (3) Jepang akan berusaha mencari cara untuk menjembatani kesenjangan antara ASEAN dan Indocina. Sederhananya, tiga pilar dalam kebijakan

luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara tersebut dapat dikarakterisasikan sebagai non-militer, berorientasi politik, dan berorientasi budaya.

Dalam buku Sudo Sueo (1992) dituliskan bahwa terdapat tiga alasan keterlibatan aktif Jepang di Asia Tenggara sejak ditetapkan doktrin Fukuda tersebut: (1) Terkait dengan menurunnya *security role* Amerika di wilayah Asia Tenggara sehingga doktrin Fukuda memberikan kerangka sistematis bagi arah politik Jepang di wilayah ini. Lebih lanjut, Jepang mencoba memainkan peran sebagai mediator dengan membawa misi perdamaian antara negara-negara ASEAN dengan blok Indocina; (2) Sejak deklarasi doktrin Fukuda, pemerintah Jepang telah secara aktif membangun hubungan dengan ASEAN sebagai organisasi regional utama. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan Jepang kepada proyek-proyek regional, pendanaan bagi pertukaran budaya, dan konferensi-konferensi yang sering dilakukan antara menteri-menteri luar negeri Jepang dan negara-negara ASEAN; (3) Kebijakan Jepang terhadap masalah Utara-Selatan, menjadi lebih konstruktif sejak 1978 dengan adanya peningkatan tekanan politik dari ASEAN dan pendekatan UNCTAD yang kelima di Manila.

Baik selama masa Perang Dingin dan sesudahnya, Jepang tetap menganggap Asia Tenggara penting. Kepentingan-kepentingan Jepang antara lain: (1) Kepentingan utama Jepang di Asia Tenggara terkait dengan ketergantungan komersial dan sumber daya. JICA (*Japan International Cooperation Agency*) menyatakan bahwa Asia Tenggara penting karena kedekatan secara geografis dengan Jepang, sehingga negara-negara ini terkait dengan Jepang secara ekonomi, budaya, dan sejarahnya; (2) Asia Tenggara berada di rute perdagangan utama Jepang, yaitu Selat Malaka, dimana wilayah ini penting bagi jalur suplai minyak Timur Tengah menuju Jepang; (3) Terkait dengan jalur laut di wilayah ini, Jepang memiliki kepentingan terjaganya kohesi di Asia Tenggara, terutama stabilitas di Indonesia; (4) Terkait dengan jumlah warga negara Jepang yang tinggal ataupun berkunjung di Asia Tenggara; 5) Kemunculan Cina sebagai kekuatan di kawasan Asia Pasifik (Smith 2006, 184).

Kondisi Politik Domestik dan Ekonomi Jepang Sejak Era Pasca-Perang Dunia II

Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membawa perubahan yang monumental. Kondisi ekonominya hancur dan struktur sosial politiknya telah berubah secara drastis. Di awal era pendudukan sekutu, fokus SCAP diarahkan kepada proses *disarmaming* dan mentransformasi negara Jepang menjadi demokrasi yang tidak akan lagi mengancam perdamaian dunia. Terdapat reformasi ekonomi yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu (Smith 2006): (1) Reformasi agrarian; (2) Reformasi tenaga kerja (undang-undang tenaga kerja dan sebagainya); (3) Penghapusan *Zaibatsu* dan penetapan *Anti-Trust Law*; (4) *Land Reform*.

Pada era pasca-Perang Dunia II, Jepang berhutang kepada AS dalam membantu memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi pascaperang. Adanya demokratisasi Jepang, kebijakan anti monopoli, *land reform*, dan perubahan di dalam masalah ketenagakerjaan, membuat ekonomi Jepang menjadi kompetitif dan dinamis. Jepang dapat menjaga tingkat pertumbuhan perekonomian hingga tahun 1973 karena adanya lingkungan yang mendukung (Ryutaro 1991, 29).

Pada intinya, terkait dengan usaha Jepang membangun pertumbuhan ekonomi pascaperang, kebijakan luar negeri Jepang di bidang ekonomi dimulai dengan kebijakan reparasi kerusakan pascaperang yang ditujukan pada negara-negara Asia.

Hal ini bertahan selama tahun 1960-an hingga 1970-an dan merupakan dasar kebijakan luar negeri Jepang saat itu. Kerjasama ekonomi antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara saat itu ditujukan untuk membangun infrastruktur di negara-negara penerima yang secara reguler melibatkan ekspor Jepang (Yoichi 1994, 150-151).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, faktor lain yang tidak dapat dipisahkan dari perumusan politik luar negeri adalah kondisi politik domestik, terutama di level para pembuat kebijakannya. Pada saat itu, sistem politik Jepang berada di bawah sebuah sistem yang sering disebut dengan "sistem 1955". Di bawah sistem "1955", terdapat sebuah partai politik yang mendominasi perpolitikan Jepang yaitu LDP (*Liberal Democratic Party*). LDP menjaga kekuasaan dengan sebuah formula sederhana, yaitu pertumbuhan ekonomi dan persekutuan dengan negara Amerika Serikat. Walaupun di dalam tubuh LDP sendiri terdapat persaingan antar beberapa kelompok (*faction*), tetapi mereka akan bersatu untuk menghadapi partai lawan (Michael 2003, 35).

Di bawah "sistem 1955", kebijakan luar negeri Jepang dianggap paling konsisten. Adanya stabilitas kepemimpinan politik mempermudah Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan aliran ODA (*Official Development Program*) kepada negara-negara penerima (Michael 2003).

Hubungan Jepang dan Negara-Negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia di Awal Tahun 1970-an

Pada tahun 1970, tingkat kemakmuran nasional Jepang membuat negara-negara di Asia Tenggara merasa kecil. Sebagai contoh, pendapatan per kapita Jepang pada saat itu mencapai 10 kali lebih besar dengan GNP yang melebihi jumlah total gabungan GNP negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Para pembuat kebijakan di Jepang menyadari pentingnya untuk mendorong perekonomian Asia Tenggara dan melihat ASEAN sebagai *partner*, sehingga Jepang bersedia memberikan berbagai saran dan bantuan kepada negara-negara di kawasan ini setelah tahun 1970. Pada tahun 1971, Jepang mengkonsentrasikan sebesar 15,6% dari total investasi luar negerinya di ASEAN, dan jumlah ini meningkat hingga 36,4% dalam 5 tahun berikutnya. Jepang juga melakukan impor dari Asia Tenggara sebesar 93% dari kebutuhannya akan *tin*, 90% akan karet, dan 40% akan *copper*, *bauxite*, dan kayu (James 2001, 94).

Ekspansi ekonomi dan perdagangannya di awal tahun 1970-an mengembalikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi besar. Hal ini membuat gejolak di dalam negara-negara di Asia Tenggara. Ketika Tanaka datang ke Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1974, ia menghadapi beberapa demonstrasi kemarahan dan tuduhan akan arogansi bisnis Jepang. Kaum yang melakukan protes tersebut mengkritisi bahwa Jepang merupakan negara yang merasa dirinya superior dan tidak peduli kepada masalah lokal. Lebih dari itu, mereka marah karena pemerintah Jepang meminta dilakukan pembelian terhadap barang-barang Jepang di balik adanya pemberian bantuan luar negeri. Hal ini dianggap menghalangi negara-negara miskin melakukan impor barang dengan harga rendah. Investasi di Asia Tenggara sebenarnya merupakan bagian dari usaha rekonstrukturisasi industri Jepang dan usaha untuk berintegrasi dengan ekonomi dunia pada akhir tahun 1970-an (James 2001).

Indonesia merupakan sumber bahan material mentah yang penting bagi Jepang pada era pascaperang tersebut. Indonesia menyediakan tekstil, produk *forestry*, dan ikan. Tetapi yang paling menarik adalah suplai minyak. Pada tahun 1980, Indonesia

merupakan *supplier* minyak terbesar kedua bagi Jepang dan menerima sejumlah besar ODA (*Official Development Assistance*) dari Jepang. Setelah perang di Vietnam, Jepang mempromosikan sebuah *joint venture* di Indonesia untuk mentransformasi negara Indonesia dan memasukkannya ke dalam area pengaruh ekonominya (*economic sphere of influence*). Pada 1976, Jepang menginvestasikan 2,6 miliar dollar AS, dengan lima perusahaan yang memiliki kendali atas investasi tersebut. Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut memiliki kendali total dan meminta Indonesia membeli barang-barang manufaktur dan bahan mentah dari Jepang dengan harga mahal. Investasi Jepang meningkat dari 7 miliar dollar AS menjadi 74 miliar dollar AS. Pada saat inilah kemudian *partnership* antara Jepang dan Indonesia dianggap tidak seimbang. Indonesia pada saat itu bergabung dengan AS dan ASEAN mengkritisi pemerintah Jepang yang dianggap memblokir investasi dari luar ke Jepang (James 2001).

Selain dari segi ekonomi, pada tahun 1970-an, dalam *Diplomatic Bluebook* dapat ditemukan adanya usaha mempromosikan *mutual understanding* serta promosi pertukaran budaya antara Jepang dan negara-negara yang menjalin hubungan dengannya. Dalam *Diplomatic Bluebook* 1978 disebutkan bahwa adanya pertukaran budaya dan hubungan *heart-to-heart* menjadi penting dalam hubungan antarnegara (mofa.go.jp 2010). Dalam *Diplomatic Bluebook* juga dituliskan bahwa demi tercapainya pertukaran budaya tersebut, dibentuklah *Japan's Foundation* pada tahun 1972 yang akan menjalankan adanya pertukaran budaya ini secara sistematis (mofa.go.jp 2010).

Kesimpulan

Secara sederhana dalam membahas mengenai kebijakan luar negeri, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Baik dari aspek internal atau domestik negara tersebut, aspek eksternal, dan kejadian-kejadian internasional yang mempengaruhi. Adanya pergeseran kebijakan luar negeri dapat terjadi bila terdapat perubahan situasi internasional yang membuat suatu negara harus merumuskan ulang tindakan yang akan diambilnya dalam *world politics* ataupun hubungan bilateral antarnegara.

Dalam melihat tentang kemunculan *Fukuda Doctrine* sebagai salah satu dasar kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara di Asia Tenggara ataupun ASEAN (termasuk Indonesia di dalamnya), terdapat beberapa variabel yang mendorong kemunculannya, antara lain situasi internasional dimana AS mulai meninggalkan Asia Tenggara, kebutuhan Jepang akan *raw material*, dan kemunculan gerakan-gerakan anti-Jepang seperti peristiwa Malari. Kesemua variabel tersebut menyadarkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam berhubungan dengan negara-negara Asia Tenggara tidak cukup hanya menggunakan diplomasi ekonomi saja. Sehingga kemudian muncul pendekatan-pendekatan yang lebih halus seperti penekanan pada hubungan yang didasari prinsip *heart-to-heart* dan melalui sarana pertukaran budaya yang bersifat lebih *low politic*.

Daftar Pustaka

Buku

- Green, Michael J, 2003. *Japan's Reluctant Realism*. New York : Palgrave.
- Cooney, Kevin, 2007, *Japan's Foreign Policy Since 1945*. New York : East Gate Book.
- Matray I, James, 2001. *Japan's Emergence As A Global Power*. Westport : Greenwood Press.
- Sato, Yoichiro & Satu Limaye, 2006. *Japan in A Dynamic Asia*. Lanham : Lexington Books.
- Sueo, Sudo, 1992. *The Fukuda Doctrine: New Dimension in Japanese Foreign Policy*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Taichi, Ryutaro, 1991. *The Contemporary Japanese Economy*. Tokyo : University of Tokyo Press.

Artikel Online

- Beeson, Mark, 2001. *Japan and Southeast Asia: The Lineaments of Quasi-hegemony*. [online]. dalam [http://eprint.uq.edu.au/archive /00000730/01/mbquasi.pdf](http://eprint.uq.edu.au/archive/00000730/01/mbquasi.pdf) [diakses: 15 November 2010].
- Ministry of Foreign Affair Japan, *Diplomatic Bluebook 1978*. [online]. dalam <http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1978/1978-3-4.htm>